

PEMAKNAAN MAHASISWA TENTANG KOMUNISME DI PURWOKERTO

KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH

Dimas Aditya Nugroho, Tri Wuryaningsih

Program Studi S1 Sosiologi FISIP Unsoed

dimasapanugroho@gmail.com

ABSTRAK

Partai Komunis Indonesia pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia hingga tahun 1965. Namun karena kejadian G30S/PKI pada September 1965 pada akhirnya melalui TAP MPRS nomor XXV/1966 tentang pembubaran dan pelarangan PKI, secara mendadak partai tersebut menjadi musuh masyarakat. Penelitian ini berfokus kepada pemaknaan mahasiswa terhadap komunisme dan eks-tahanan politik (tapol) PKI di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Informan penelitian yaitu mahasiswa yang berkuliah di 4 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Purwokerto. Jumlah informan ada 8 orang, terdiri atas 4 laki-laki dan 4 perempuan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, informan memaknai secara berbeda tentang stigma komunis yang dibangun oleh Orde Baru. Perbedaan pemaknaan muncul setelah mereka mencari informasi dari sumber lain di luar sekolah. Respon informan terhadap eks-tapol juga bervariasi. Dukungan moral diutarakan pula oleh informan. Mereka menolak persekusi terhadap penganut paham komunis, namun pembedaan kepada yang berstatus eks-tapol masih dianggap perlu.

Kata kunci: Pemaknaan, Komunisme, Mahasiswa

ABSTRACT

The Indonesian Communist Party (PKI) was once one of the largest parties in Indonesia until 1965. However, due to the G30S/PKI incident in September 1965, through TAP MPRS number XXV/1966 regarding the disbandment and banning of the PKI, the party suddenly became an enemy of the people. This study focuses on the meaning of students towards communism and ex-political prisoners (tapol) of the PKI in Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java. The research method used is a qualitative method. Research informants are students who study at 4 universities both public and private in Purwokerto. The number of informants was 8 people, consisting of 4 men and 4 women. Data obtained through interviews, observation and documentation, then analyzed by interactive data analysis techniques. The results showed that the informants interpreted differently about the communist stigma built by the New Order. Differences in meaning emerged after they sought information from other sources outside of school. Informants' responses to ex-tapol also varied. Informants also conveyed moral support. They reject the persecution of communists, but the distinction between ex-tapol status is still considered necessary.

Keywords: Meaning, Communism, Students

1. PENDAHULUAN

Bentuk diskriminasi di dalam kehidupan eks-tahanan politik (tapol) merupakan sesuatu yang lumrah mereka terima. Ketidakadilan pemerintah kepada para keturunan eks-tapol yang tidak boleh menjadi pegawai negeri, wartawan, dinas kemiliteran, dilarang mempublikasikan karya mereka dan kesulitan masuk ke perguruan tinggi negeri membuat kehidupan mereka sebagai warga negara terasa dibatasi. Walau sudah banyak organisasi atau lembaga yang berusaha memperjuangkan kehidupan para eks-tapol tetapi citra masyarakat yang selalu mengaitkan mereka sebagai komunis masih kuat. Komunis yang dianggap *atheis* adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ideologi Pancasila. Hal ini melahirkan cemoohan terhadap para eks-tapol dan keturunannya. Kondisi politik di setiap pemilihan umum (pemilu)

terutama pemilu presiden selalu membuat isu-isu yang disebarakan oleh para elit politik semakin terasa kasar. *Black campaign* untuk memperebutkan posisi membuat trauma atau fobia di masyarakat yang sudah ada menjadi salah satu cara tercepat untuk menjatuhkan posisi lawan. Sebagai contoh, isu yang menyatakan presiden saat ini, Joko Widodo, adalah seorang PKI (Subekti, 2015). Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap eks tapol. Citra yang sudah mulai diredam dan bukti-bukti sejarah yang sedikit demi sedikit diperbaiki, kembali memanas. Masyarakat kembali memusuhi para eks tapol dengan berita yang mendiskriminasi mereka.

Eks-tapol merupakan produk dari pemerintahan Orde Baru. Pada masa kini mereka telah kembali kepada kehidupan bermasyarakat dan secara sosial seharusnya telah diakui. Orang-orang yang mendapatkan “tanda” eks-tapol adalah mereka yang telah dibebaskan dari tahanan atas tuduhan keterlibatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) ataupun organisasi yang berada di bawahnya. Pembebasan orang-orang yang diduga berkaitan dengan PKI dimulai tahun 1977 saat Indonesia didesak oleh pihak internasional tentang hak-hak para tahanan politik tersebut. Tetapi para tahanan tersebut masih dalam pengawasan dari pemerintah dengan memberikan mereka tanda di Kartu Tanda Penduduk (KTP) berupa keterangan “ET” dan kegiatan mereka masih dibatasi. Propaganda antikomunis yang digencarkan oleh Orde Baru dalam skala nasional telah membentuk identitas nasional. Dalam konsep memori kolektif, identitas nasional mempunyai makna sebagai kekuatan hegemonik yang ada di dalam negara kebangsaan yang menyisihkan dan membungkam wacana identitas lain yang ada (Olick & Robbins, 1998). Dalam wacana antikomunis, identitas nasional berarti ‘diri’ yang pancasilais, sedangkan yang tidak termasuk ‘diri’ berarti adalah ‘yang lain’, komunis (Budiawan, 2004). Dengan kata lain, untuk menjadi warga negara Indonesia maka seseorang harus antikomunis. Hal tersebut selanjutnya, membentuk pengalaman khusus yang dirasakan bersama, yang kemudian menjadi basis identitas kelompok melalui proses identifikasi (Misztal, 2003). Lebih jauh lagi, identitas kelompok juga secara resiprokal menentukan apa yang harus diingat dalam masyarakat “memori sosialnya” (Gillin, 1954).

Pascareformasi ditandai dengan mulainya sistem pemilihan secara langsung. Di bawah presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono, tidak begitu banyak terjadi isu-isu diskriminasi terhadap eks-tapol. Saat itu muncul gerakan “kamisan” pada 2007 yang menyuarakan gerakan HAM termasuk di dalamnya para “aktivis 65” dan eks-tapol. Hal ini menandakan ada sedikit kelonggaran dari pemerintah terhadap eks-tapol yang dianggap sebagai ancaman pada masa Orde Baru. Pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo isu PKI kembali muncul dengan

selalu menghubungkan Presiden Joko Widodo sebagai keturunan PKI dan dikaitkan dengan kebangkitan PKI. Isu yang muncul seperti itu kembali membuat kebencian terhadap keturunan PKI dan kekhawatiran terhadap pergerakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat (Boni, 2018).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Suseno (2001) ajaran komunisme memiliki 3 (tiga) bagian. Pertama, sebuah landasan berpikir tentang materialisme dialektis dan materialisme historis. Kedua, pemikiran tentang ekonomi politik yang berisi kritik terhadap kapitalis, dan ajaran ekonomi sosialisme serta komunisme. Ketiga, berisi strategi dan taktik perjuangan revolusi kaum proletar. Komunisme pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1830 berbarengan dengan kata sosialisme, pada awalnya kedua kata tersebut memiliki arti yang sama namun, kata komunisme dipakai oleh aliran sosialis yang lebih radikal dan menuntut penghapusan total hak kepemilikan pribadi dan mengharapkan keadaan lebih baik bukan dari yang diberikan pemerintah melainkan perjuangan kaum miskin (Suseno, 2001).

Karl Marx yang merupakan tokoh pencetus ideologi komunis hidup pada masa Revolusi Prancis dan Revolusi Industri di Inggris. Perkembangan ekonomi yang pesat membuat kesenjangan di masyarakat, nilai tenaga buruh jatuh, tenaga kerja mulai diganti dengan mesin-mesin, pengangguran merajalela dan tingkat kemiskinan pada masyarakat meningkat. Ajaran komunisme Marx yang paling populer yaitu keterasingan dalam pekerjaan dan teori kelas. Dalam keterasingan pekerja, Marx menjelaskan tindakan manusia yang paling dasar adalah pekerjaan. Dengan bekerja, manusia memiliki esensi untuk hidupnya, menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memastikan dirinya, selalu berhadapan dengan orang lain, dan memiliki rasa untuk saling membutuhkan. Dengan begitu, seharusnya manusia dapat melakukan pekerjaannya dengan rasa bebas namun keterasingan muncul akibat dari kepemilikan alat pribadi. Pekerjaan tidak memiliki arti bagi pekerja karena hasil produk dari pekerja akan menjadi milik pribadi dari pemilik alat. Lalu, pekerja akan menjadi terasing karena hanya menjadi keterpaksaan dalam pekerjaan dan hasilnya akan menjadi milik orang lain bukan berdasarkan hasrat dan dorongan dari batinnya. Dengan demikian pekerja berada dibawah pemilik modal/kapitalis yang tidak bekerja (Rujikartawi, 2015).

Komunisme di Indonesia dibawa masuk oleh Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet berkebangsaan Belanda pada tahun 1914 dan bersama temannya Adolf Baars mereka mendirikan Indische Social Democratische Vereeninging (ISDV) atau serikat buruh kereta api. Semaun dan Darsono sebagai anggota Sarekat Islam (SI) pernah belajar tentang komunisme kepada Sneevliet di ISDV. Karena SI yang kurang memperhatikan nasib petani

membuat pergerakan Semaun dan Darsono dalam organisasi tersebut menjanjikan pemikiran baru yang lebih radikal, membuat organisasi SI terpecah menjadi SI merah di bawah pimpinan Semaun dan SI putih yang menolak pemikiran radikal Semaun. Akibat dari perpecahan tersebut H. Agus Salim menegakkan disiplin partai terhadap SI yang membuat organisasi massa Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam sebagai pecahan dari SI putih sedangkan SI merah yang dipimpin oleh Semaun menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada tahun 1926 di Banten dan tahun 1927 di Salukang, Sumatra Barat PKI pimpinan Semaun semakin sering melakukan pemberontakan pada pemerintah kolonial namun karena pemikiran komunisme yang masih terhitung baru di masyarakat dan tidak memiliki rasa revolusioner terlebih dahulu membuat kekuatan pemberontakan PKI tidak maksimal sehingga mengakibatkan kegagalan dalam pemberontakan tersebut. Tan Malaka yang masih menyuarakan kemerdekaan Indonesia dan pemikiran komunisme kembali terlihat aktif ketika Muso mendirikan Partai Komunis Indonesia sekaligus berusaha mendirikan negara “Republik Soviet Indonesia” di Madiun pada 18 September 1948. Gerakan tersebut sendiri mendapat kecaman dari berbagai basis PKI di daerah lain terutama PKI pimpinan Tan Malaka yang menganggap kaum proletar di Indonesia adalah petani bukan buruh seperti di Uni Soviet dan memprediksikan pemberontakan akan gagal. Dalam waktu tidak sampai 2 minggu, pemberontakan PKI di Madiun diredam oleh divisi Siliwangi. Ketika D.N Aidit kembali dari Republik Rakyat Tiongkok popularitas PKI sebagai partai berideologi komunisme menguat. Jumlah keanggotaan PKI yang terus meningkat sampai dengan tiga juta anggota membuatnya menjadi salah satu kekuatan politik di Indonesia sehingga 30% suara dalam pemilu daerah dikuasai. Akibat pertumbuhan kaderisasi PKI serta pemikiran komunisme yang selalu menyuarakan masyarakat tanpa kelas dan meminta kepada Presiden Soekarno untuk membuat angkatan ke-5 yang dipersenjatai serta dan terdiri dari petani dan buruh, membuat politik Indonesia ketika itu memanas. Pemberontakan G30S/PKI dianggap sebagai kudeta terhadap negara membuat para anggota, partisipan serta keluarga PKI dianggap penghianat serta diburu dan dibuang, antara lain, ke Pulau Buru.

Sejumlah penelitian tentang komunisme di Indonesia telah dilakukan. Sebagai misal, penelitian berjudul “Memori Kolektif Mengenai PKI dan Komunisme di Media Sosial Eks tapol PKI” menunjukkan bahwa G30S/PKI sudah mendapat makna yang berbeda dari komunisme lainnya, dianggap sebagai individu atau kelompok yang tidak beragama dan kejam (Kurniawan A. D., 2017). Setiap kali berurusan dengan komunisme, masyarakat melakukan penolakan atas dasar makna yang dibangun masyarakat sejak Orba yang masih

menempel. Kekejaman PKI yang menjadi fokus utama di media sosial menjadikan keinginan membela eks tapol serta meluruskan sejarah selalu dicap “PKI”.

Penelitian lain dilakukan oleh (Murthi, 2007) dengan judul “Pembersihan Kelompok Kiri di Surabaya 1965-1978”. Penelitian ini mengkaji tentang tindakan atas citra yang dimiliki oleh tapol di Surabaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat sipil bertugas sebagai pelaku penangkapan dan informan yang dituduh sebagai PKI. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan banyak sekali pihak yang terlibat dan mendapatkan keuntungan material yang bersifat pribadi dari kejadian pembersihan di Surabaya.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan ataupun lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati (Maleong, 2010). Informan penelitian yaitu mahasiswa yang sedang berkuliah di empat perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jumlah informan ada 8 orang, terdiri atas 4 laki-laki dan 4 perempuan dengan rentang usia 20 – 23 tahun. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan dasar pertimbangan: (1) memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik masa Orde Baru, masa pasca-reformasi, dan ideologi komunis secara umum, yang diperoleh selama menempuh pendidikan dari SD hingga kuliah serta pergaulan di lingkungan masyarakat, (2) memiliki pemahaman tentang eks-tapol berupa informasi yang diperoleh baik dari lingkungan pribadi maupun pendidikannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Pertanyaan melalui wawancara difokuskan pada pemaknaan informan atas komunisme melalui pandangannya terhadap eks-tapol PKI, pengetahuan umum dan pemahamannya tentang politik masa Orde Baru dan pascareformasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis interaktif yang komponen-komponennya terdiri atas pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Semua proses tersebut berjalan secara ongoing (Huberman & Miles, 1992).

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1. Makna Komunisme Bagi Mahasiswa di Purwokerto

Pada dasarnya makna akan selalu berbeda karena pengalaman setiap individu selalu bervariasi. Kondisi lingkungan, latar belakang, dan pengalaman dari setiap individu pun berpengaruh dalam memaknai. Seperti halnya dengan para mahasiswa yang berkuliah di

Purwokerto. Dalam memaknai komunisme, setiap mahasiswa bisa berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, memandang komunisme sebagai sebuah ajaran yang tidak memiliki Tuhan, dan pemaknaan kedua adalah sebuah pandangan hidup yang berhubungan dengan ekonomi yang materialistis. Komunisme lebih sering diidentikkan dengan tidak bertuhannya orang yang menganutnya.

Di Indonesia tidak ada literatur yang secara ilmiah dapat menjelaskan bagaimana bisa komunisme di Indonesia selalu dikaitkan dengan masyarakat yang tidak percaya Tuhan sedangkan masyarakat Indonesia dikenal beragama dan religius. Oleh sebab itu, perkembangan komunisme di tengah organisasi keagamaan cukup besar ketika itu menjadi hal yang mengherankan. Sebagaimana telah disinggung di muka, komunisme ini malah berkembang dan mendapat dukungan dari anggota Sarekat Islam (SI) yang mengakibatkan terpecahnya organisasi tersebut menjadi 2 (dua) yaitu SI putih yang dipimpin H. Agus Salim dan SI merah dipimpin Semaun.

Ajaran komunisme memiliki citra sebagai musuh dari kaum agamis dimulai ketika pencetus ideologi komunisme, Karl Marx, menulis “Kesengsaraan agamis merupakan ekspresi kesengsaraan riil sekaligus merupakan protes terhadap kesengsaraan yang nyata tersebut. Agama adalah keluhan para makhluk tertindas, jantung hati sebuah dunia tanpa hati, jiwa untuk keadaan tak berjiwa. Agama adalah candu rakyat” sebuah tulisan yang ditujukan untuk kritik terhadap filsafat Friedrich Hegel (Marx, 1843). Akhir kalimat yang menyatakan ”Agama adalah candu rakyat” menjadi sebuah pernyataan yang kontroversial di kalangan agamis. Bagi Marx, agama diciptakan oleh manusia bukan agama yang menciptakan manusia lalu digunakan masyarakat kelas untuk memanipulasi dan menindas kelas di bawahnya (Muttaqin, 2013). Kondisi anti kelas yang diperjuangkan oleh kaum komunis untuk menunjang taraf ekonomi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kepemilikan alat pribadi merupakan salah satu konsep dalam komunisme agar tidak tertindas oleh kaum kapitalis atau pemilik modal dan alat.

Citra komunisme yang mengajarkan kritik terhadap kaum kapitalis dan perlawanan serta tidak terima apa adanya kondisi hidup masyarakat bergeser saat doktrin Orde Baru berkuasa. Pergeseran pandangan tersebut pun bisa dianggap berhasil karena kekuasaan rezim Orde Baru terus berlanjut selama 32 tahun dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemahaman komunisme yang sesungguhnya kritis terhadap kaum kapitalis (dalam hal ini juga negara) diganti dengan menayangkan film-film yang bertema perjuangan dengan menjadikan Partai Komunis Indonesia sebagai musuh bangsa. Hal ini pun masih bisa dirasakan oleh para

mahasiswa ketika bersekolah di daerahnya masing-masing. Penayangan film yang dilakukan setiap tahun ketika bulan September masih mereka rasakan walaupun itu terjadi ketika mereka masih berada di sekolah dasar (SD). Film G30S/PKI sebenarnya sudah tak lagi wajib ditayangkan di televisi dan bioskop nasional sejak tahun 1998. Hal ini dilakukan atas permintaan dari PP AURI kepada Menteri Penerangan Yunus Yosfiah dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono (tempo.co, 2012). Hal ini langsung ditanggapi dengan adanya perintah dari Menteri Penerangan Yunus Yosfiah dengan mempersiapkan film baru berjudul “Bukan Sekedar Kenangan” sebagai pengganti dari film tahunan G30S/PKI tersebut yang memiliki sudut pandang perorangan. Namun pada akhirnya film tersebut tidak jadi dirilis dan ditayangkan oleh pemerintah yang pada akhirnya kegiatan tahunan yang sudah berjalan sejak 1984 tetap berlanjut di sekolah walaupun tidak dijadikan kewajiban.

3.2. Respon Mahasiswa Terhadap Eks Tapol dari Partai Komunis Indonesia

Sikap para mahasiswa terhadap eks-tapol dari PKI berbeda. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa yang ada di Purwokerto menunjukkan adanya dua sikap yang menunjukkan respon mereka terhadap komunisme. Pertama, bersikap netral terhadap eks-tapol yang dianggap menganut paham komunis dan merasakan tindak persekusi masyarakat ketika Orde Baru. Sikap yang kedua, menolak secara tegas dengan para eks-tapol yang menyuarakan keadilan. Para mahasiswa yang bersikap netral tidak melihat eks-tapol sebagai orang yang seperti digambarkan sejarah yang telah diketahui oleh mereka melalui proses belajar selama ini. Sikap utama yang paling banyak diungkapkan oleh mahasiswa adalah “acuh tak acuh” atau tidak begitu mempermasalahkannya sebagai eks-tapol seperti apa yang dilakukan ketika Orde Baru. Bagi para mahasiswa, para eks-tapol sudah berubah karena telah mendapatkan hukuman yang sesuai dan menjadi pembatasan kepada para eks-tapol untuk tidak mengganggu ideologi negara Indonesia.

Selain itu, bagi para mahasiswa eks-tapol saat ini sebagian besar hanya keturunannya. Menurut mahasiswa, mereka saat ini tidak ada yang merasakan secara langsung kejadian dan ajaran yang disebarkan oleh PKI saat itu. Ketika kejadian tersebut mahasiswa yakin para keturunannya tidak mengerti apa yang terjadi, para orang tua atau kerabat mereka ditangkap. Penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam PKI yang dilakukan oleh aparaturnya, dalam hal ini militer, dibantu dan didukung oleh warga sipil, membuat penangkapan ini menjadi masif. Hampir di seluruh Indonesia terjadi penangkapan terutama di daerah yang dipandang menjadi basis utama dari PKI, tidak terkecuali Banyumas.

Penangkapan pun berlangsung di beberapa daerah walau tidak terjadi di semua daerah kabupaten Banyumas. Warga sipil yang tergabung dalam penangkapan memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Respon yang diterima mahasiswa didapatkan dari pengalaman pribadi yaitu mendengar informasi eks tapol dari berita dan pendidikan yang didupatkannya. Respon yang diberikan mahasiswa tidak ada yang secara utuh, melainkan hanya sebatas seperti diskusi tentang keadilan yang seharusnya didapatkan eks tapol dan lebih membiarkan mereka karena menganggap kejadian masa lalu tersebut tidak akan terulang sekarang. Kondisi tersebut tampak bertentangan dengan beberapa sila yang ada dalam Pancasila seperti, pembedaan antargolongan dan nilai-nilai kemanusiaan yang dicita-citakan untuk menciptakan persatuan di Indonesia. Hal itu dilakukan oleh masyarakat karena kekhawatiran yang secara tidak sadar terbentuk dalam lingkungan masing-masing. Pemaknaan yang berbeda dari setiap informan mengakibatkan respon yang berbeda juga karena bentuk stimulus atau rangsangan dalam memaknai.

4. KESIMPULAN

Pemaknaan komunisme di Indonesia masih memiliki bias yang sangat jelas antara komunisme dan PKI. Partai yang pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia ini secara hukum menurut TAP MPRS/XXV/1966 menjadi sebuah partai terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut juga berisi tentang larangan kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme. Ketetapan tersebut membuat masyarakat menjadi berhati-hati dengan PKI ataupun yang berbau komunis. Komunisme sebagai ajaran yang dipandang tidak percaya Tuhan dan sebuah ideologi ekonomi adalah pemaknaan yang paling sering diungkapkan mahasiswa Purwokerto. Indoktrinasi melalui film dan buku-buku pelajaran yang dilakukan Orba masih melekat hingga pascareformasi. Mahasiswa yang belum lahir saat Indonesia dilanda pergolakan pada 1965, sepenuhnya sadar akan stigma negatif yang melekat pada semua hal yang berbau komunis. Isu-isu yang selalu dikumandangkan setiap tahun untuk memperingati pengkhianatan PKI pun salah satu hal yang membuat pemaknaan tidak berubah semenjak Orba.

Respon terhadap komunisme pun cenderung tidak berubah. Masih ada mahasiswa yang memungkinkan melakukan persekusi atau bahkan intimidasi terhadap orang-orang yang menganut ajaran komunis dalam hal ini terhadap para eks-tapol PKI. Mungkin respon negatif

tidak seaktif dan berskala besar seperti di era Orba namun hal-hal seperti itu bukan berarti tidak akan terjadi lagi. Setiap tahun, apa lagi saat pemilu, isu seperti kebangkitan PKI muncul kembali dan terjadi di beberapa daerah Indonesia. Pembakaran atribut sampai pemukulan sebagian orang yang membenci PKI sering terjadi. Respon tersebut memang tidak sekeras di zaman Orba tetapi pembedaan dan usaha untuk menjauhi orang-orang eks-tapol dipandang termasuk dalam diskriminasi sosial. Para informan yang hanya memperoleh wawasan tentang komunisme dari pendidikan di sekolah tidak memberikan respon atau pemaknaan baru tentang komunisme tetapi cenderung sama dengan informasi yang dibangun Orba. Komunisme masih selalu tentang PKI yang kejam dan tidak bertuhan. Tanggapan baru informan yang membatasi komunisme sebagai ideologi ekonomi yang selalu menitikberatkan antara konflik kapitalis dan borjuis soal modal serta hasil yang didapatkan perusahaan, bukan ditempatkan sebagai pandangan hidup atau cara berpikir kritis.

Daftar Pustaka

- Bhawono, A. (2017). September. *Sejarawan : Film G30S/PKI Alat Propaganda Orba*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3645573/sejarawan-film-g-30-spki-alat-propaganda-orba>
- Boni. (2018). Oktober 13. *Isu PKI*. Retrieved from *suara.com*: www.suara.com (diakses 30 Oktober 2021)
- Budiawan. (2004). *Mematahkan Pewaris Ingatan : Wacana Anti Komunisme dan Politik Rekonsiliasi Pasca- Suharto*. Jakarta: ELSAM.
- Gillin, & G. (1954). *Cultural Sociology : A Revision of An Introduction to Sociology*. New York: The Mac Millan Company.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1992). *Analisis data Kualitatif*. Penerjemah: T. Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Kurniawan, A. D. (2017). *Memori kolektif Mengenai PKI dan Komunisme di Media Sosial*. Depok: Fisip Universitas Indonesia.
- Maleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marx, K. (1843). *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right Introduction*. (T. Sparague, Trans.) Paris: in Deutsch-Französische Jahrbucher.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, And Society*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Misztal, B. (2003). *Theoris of Social Remembering*. Philadelphia: Open University Press.
- Murthi, Y. H. (2007). *Pemberihan Kelompok Kiri di Surabaya 1965-1978*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Muttaqin, A. (2013). Karl Marc dan Friederich Nietzsche Tentang Agama. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.7, 1-3.

- Olick, J., & Robbins, J. (1998). "Collective Memory" to the Historical Sociology of Memonic Practices. *Social Memory Studies*, 105-150.
- Rujikartawi, E. (2015). Komunisme: Sejarah Gerakan Sosial dan Ideologi Kekuasaan. *Qathruna*, 80-81.
- Subekti, R. (2015), September. Ayah Jadi Pimpinan PKI Boyolali? Ini Kata Presiden Jokowi. Retrieved from *pojoksatu.id*: www.pojoksatu.id (diakses 22 Mei 2021)
- Suseno, F. M. (2001). *Pemikiran Karl Marx*. Jakarta: Gramedia.
- tempo.co. (2012, September 29). *Nasional.tempo.co*. Retrieved from Cerita dibalik Penghentian Pemutaran Film G30S/PKI: <https://nasional.tempo.co/read/432758/cerita-dibalik-penghentian-pemutaran-film-g30s> (diakses 20 April 2021)